STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB UMKU) SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No Dokumen :
 Revisi :
 Tgl Efektif :

- IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**
1. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA)
 2. Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
 3. Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA)

Unit Kerja : **Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemerosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pemanfaatan bagian2 jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel dan lain lain; 2. Izin lingkungan dan persetujuan analis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup - upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantau lingkungan hidup dari instansi berwenang; 3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani diatas materai); 4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BUMN); 5. Memiliki surat keterangan status wajib pajak yang valid; 6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000 dan lain lain ; 7. Analisis resiko; 8. Studi lingkungan; dan / atau 9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; 10. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten /Kota 11 Lampiran Teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan b. Kajian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	17 (tujuh belas) hari kerja
4.	BIAYA /TARIF	Tidak Ada Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang telah terverifikasi
6.	MASA BERLAKU	2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan
7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service : Ruang fasilitas/customer service 2. Kota Saran : 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 4. Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254 6. Website : www.lapor.go.id 7. Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. UU RI Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Jalan ; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; 5. PP RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan ; 6. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 9. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan / Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

	11. Perwal Kota Medan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas; 12. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 13. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan.
SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4. PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5. JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi : 2 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, cepat, dan Akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sistem OSS dijamin keabsahannya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, 15 Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

11. Perwal Kota Medan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
12. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
13. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan.

SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5. JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi : 2 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, cepat, dan Akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sistem OSS dijamin keabsahannya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Kota Medan
NURBAFI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Teknis
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No Dokumen :

Revisi :

Tgl Efektif :

IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama
2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung
3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi
4. Pemanfaatan ruang pada sumber air
5. Pemanfaatan daya air dan/atau
6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut diatas

Unit Kerja: Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemerosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan; 2. Izin Lingkungan (rekomendasi Amdal/UKL-UPL/SPPL); 3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil Konsultasi publik); 4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS; 5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian/lahan yang akan digunakan; 6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai kegiatan usaha; 7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang; 8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang; 9. Fomulir data teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota); 10. Lampiran Teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan b. Kajian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang telah terverifikasi
6.	MASA BERLAKU	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkan
7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer Service : Ruang fasilitas/customer service 2. Kota Saran : 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 4. Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254 6. Website : www.lapor.go.id 7. Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; 2. UU RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 6. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan / Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Perwal Kota Medan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas; 9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan.

PERALAN, ATAU SILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi.
KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4. PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5. JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi : 2 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, cepat, dan Akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sistem OSS dijamin keabsahannya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

Nurbaiti Harahap

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

ANA, TAU LITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi.
OMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5. JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi : 2 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, cepat, dan Akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sistem OSS dijamin keabsahannya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis PU	Ketua Tim Kerja DPMPPTSP	Koordinator DPMPPTSP	Sekretaris DPMPPTSP	Kepala Dinas DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	MULAI	
2.	Berdasarkan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang belum terverifikasi, verifikasi dilakukan yang berfokus atas pemenuhan persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), jika permohonan lengkap dan benar. Jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	2 hari	Berkas permohonan terverifikasi serta lampiran teknis	
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi OPD Teknis PU							Berkas permohonan terverifikasi serta lampiran teknis	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Sub Koordinator	
4.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi ketua tim kerja							Berkas permohonan terverifikasi Sub Koordinator serta lampiran teknis	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	
5.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)							Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	
6.	Memberikan Notifikasi Persetujuan							Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	1 hari	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Ditetapkan	SELESAI

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI
(49212, 49214, 49216, 49219, 49411, 49413, 49415, 49429, 49229, 49421)**

No Dokume :
Revisi :
Tgl Efektif :

Unit Kerja **Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

A **Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemerosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian Dengan Perencanaan Kebutuhan Kendaraan (Kuota) Yang ditetapkan ; Memiliki Paling Sedikit 5 (lima) Kendaraan Yang Dibuktikan Dengan Salinan STNK, SRUT (Untuk Kendaraan Baru), Bukti Lulus Uji Berkala Dan Foto Kendaraan ; Memiliki Dan / Atau Menguasai Tempat Penyimpanan (Pool Angkutan) ; Memiliki Dan / Atau Berkerjasama Dengan Pihak Lain Yang Mampu Menyediakan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Bengkel) ; Menyusun Rencana Bisnis (Business Plan) Perusahaan Angkutan Umum ; Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dalam Trayek ; Menyiapkan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan ; Menerapkan Sistem Pemesanan Secara Elektronik ; Memasang Alat Pemantauan Pergerakan Kendaraan Secara Elektronik ; Persyaratan Lainnya (semua digabung jadi satu bentuk pdf) : <ol style="list-style-type: none"> Izin Angkutan yang masih berlaku dan atau / telah habis masa berlakunya bagi perusahaan Angkutan yang sudah mempunyai izin ; Rekomendasi dan Kajian Teknis sesuai KBLI dari Dinas Perhubungan Kota Medan ; Untuk Trayek Angkutan / Operasional Taksi Kota Bukti Setor Retribusi Daerah ; Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan, Ketentuan dan Kewajiban diatas materai ; Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen diatas materai ; Surat Pernyataan Kesanggupan Mengoperasikan Kendaraan diatas materai ; Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat dan Memberikan Laporan Pelayanan Angkutan diatas materai .
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMP TSP</p> <p>The flowchart shows the following steps: 1. Pelaku Usaha (Business Actor) applies for a Standard Certificate through OSS. 2. Sistem (System) checks NIB and SS before verification. 3. Permohonan verifikasi kepada OPD dan DPMP TSP (Application for verification to OPD and DPMP TSP) is submitted. 4. A decision diamond 'SA' (Satisfactory) determines if 'sudah terlewati' (passed) or 'belum terlewati' (not passed). 5. If passed, Sistem Otomatis Memberikan SS terverifikasi (fact proof) (System automatically issues verified SS). 6. If not passed, it goes to 'DITOLAK' (Rejected) and Sistem OSS menyampaikan penolakan (OSS system sends rejection). 7. 'DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) mengacu pada Lampiran I PP P2B2R No. 5/2021' (Business License Registration which becomes the authority of the local government (Province/City) referring to Annex I of PP P2B2R No. 5/2021). 8. 'DISETJUI' (Approved) and 'KUBANG LENGKAP' (Complete) are also shown as outcomes.</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 (lima) hari kerja
4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	<p>Sertifikat Standar telah terverifikasi meliputi KBLI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 49212 : Angkutan Bus Perbatasan 49214 : Angkutan Bus Kota 49216 : Angkutan Bus Khusus 49219 : Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya 49411 : Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek 49413 : Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek (MPU) 49415 : Angkutan Darat Khusus Bukan Bus 49429 : Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang 49229 : Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya 49421 : Angkutan Taksi
6.	MASA BERLAKU	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya
7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service Kota Saran : Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 Email : pengaduaninformasilayanan @gmail.com Website : www.lapor.go.id Media Sosial : DPMP TSP MEDAN Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :	
NO	KOMPONEN	URAIAN

		<ul style="list-style-type: none"> 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 5. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 7. PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 8. KM Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 9. KM Dirjend Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 11. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 12. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan; 13. Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 14. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 15. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Perpajakan di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi : 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali.

 Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		<p>3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja</p> <p>4. PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p> <p>5. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>6. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>7. PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;</p> <p>8. KM Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;</p> <p>9. KM Dirjend Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;</p> <p>10. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>11. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>12. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan;</p> <p>13. Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;</p> <p>14. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;</p> <p>15. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan</p>
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang fasilitas/Customer Service, Meja, Kursi.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</p> <p>2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>4. Memahami tahapan kerja</p>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Koordinator</p> <p>4. Ketua Tim Kerja</p>
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi : 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI
PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (Off Street Parking)
(52215)

No Dokumen :
 Revisi :
 Tgl Efektif :

Unit Kerja : Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemrosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	1. Memiliki Gambar Rencana Fasilitas Parkir Yang Memuat (Denah Lokasi Parkir) ; 2. Penentuan Kebutuhan Dan Persyaratan Satuan Ruang Parkir (SRP) ; 3. Ketersediaan Fasilitas Pejalan Kaki ; 4. Alat Penerangan Yang Cukup ; 5. Sirkulasi Pergerakan Arah Kendaraan ; 6. Penyediaan Fasilitas Pemadam Kebakaran ; 7. Penyediaan Fasilitas Keselamatan ; 8. Penyediaan Fasilitas Pengaman ; 9. Pemasangan Dan Penempatan Rambu, Marka Dan Media Informasi ; 10. Pengaturan Sirkulasi Udara Yang Baik Bagi Gedung Parkir dan atau / Untuk Lokasi Luar Gedung Parkir Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan lokasi ada di Luar Gedung serta lampiran foto situasi lokasi parkir tersebut ; 11. Pengaturan Radius Putar Bagi Gedung Parkir dan atau / Untuk Lokasi Luar Gedung Parkir Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan lokasi ada di Luar Gedung serta lampiran foto situasi lokasi parkir tersebut ; 12. Penyediaan Sarana Jalur Keluar Darurat Bagi Gedung Parkir dan atau / Untuk Lokasi Luar Gedung Parkir Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan lokasi ada di Luar Gedung serta lampiran foto situasi lokasi parkir tersebut ; 13. Persyaratan Lainnya (semua digabung jadi satu bentuk pdf) : a. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) / Salinan Andalalin (untuk permohonan baru / perubahan); b. Asli Izin Pelataran Parkir yang telah habis masa berlakunya (untuk permohonan daftar ulang); c. Kontruksi struktur bangunan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan dengan perundang-undangan bagi Gedung Parkir (Salinan IMB/PBG) dan atau / Untuk Lokasi Luar Gedung Parkir Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan lokasi ada di Luar Gedung serta lampiran foto situasi lokasi parkir tersebut ; d. Status Alas Hak Lahan Parkir : √ Milik Sendiri (Asli/legalisir SHM/bukti kepemilikan penguasaan lahan, tanah, bangunan) ; √ Sewa (Asli/legalisir Perjanjian Sewa Menyewa/Surat Perjanjian Kerjasama) dengan melampirkan fotocopy KTP kedua belah pihak. e. Setoran Pajak Parkir terakhir tahun berjalan , untuk permohonan baru apabila ada ; f. Rekomendasi dan Kajian Teknis KBLI 52215 dari Dinas Perhubungan Kota Medan g. Denah Lokasi Parkir yang telah disetujui/ditandai oleh Dinas Perhubungan Kota Medan ; h. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan diatas materai ; i. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen diatas materai ; j. Surat Pernyataan tidak ada perubahan (bagi permohonan daftar ulang) diatas materai .
----	--	--

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
----	------------------------	----------------------

4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
----	-------------------------	-----------------

5.	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi KBLI 52215
----	------------------	--

6.	MASA BERLAKU	2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan
----	--------------	--

7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang fasilitas/customer service 2. Kota Saran 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 4. Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254 6. Website : www.lapor.go.id 7. Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN
----	--	---

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
----	-------------	---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDART PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI
 KBL 49212, 49214, 49216, 49219, 49411, 49413, 49415, 49429, 49229, 49421

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis /Tim Teknis DPMP/TSP	Ketua Tim Kerja DPMP/TSP	Koordinator DPMP/TSP	Sekretaris DPMP/TSP	Kepala Dinas DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar melalui OSS RBA							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	MULAI
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi, verifikasi dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar, jika permohonan lengkap dan benar. Jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi beserta lampiran teknis	
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi Ketua Tim Kerja							Berkas permohonan terverifikasi	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	
4.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar							Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar	
5.	Memberikan Notifikasi Persetujuan Sertifikat Standar							Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar	1 hari	Sertifikat Standar Ditetapkan	SELESAI

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; 3. UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ; 4. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 5. PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 6. PP RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; 7. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 9. PP RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah ; 10. PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 11. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ; 12. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 13. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan; 14. Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 15. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 16. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan ;
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang fasilitas/customer service, Ruangan Kerja, Meja Kursi.
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin Ke Absahannya
8.	EVALUASI KINERJA	3 (tiga) bulan sekali.

 Medan, Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; 3. UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ; 4. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 5. PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 6. PP RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; 7. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 9. PP RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah ; 10. PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 11. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ; 12. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 13. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan; 14. Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 15. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 16. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan ;
2. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang fasilitas/customer service, Ruangan Kerja, Meja Kursi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5. JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan Perizinan yang Transparan, Cepat, dan Akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin Ke Absahannya
8. EVALUASI KINERJA	3 (tiga) bulan sekali.

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Kota Medan

NURBATH HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
 (52222)

No Dokumen :
 Revisi :
 Tgl Efektif :

Unit Kerja : Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemrosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	1. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial ; 2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan ; 3. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan; 4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan; 5. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis; 7. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau; 8. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 9. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan; 10. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba sandar kapal; 11. Bukti ketersediaan: a. Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM); c. Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau; d. Sistem Pengelolaan lingkungan; 12. Persyaratan Lainnya (digabung jadi satu bentuk pdf) : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan b. Kajian Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan c. Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; d. Dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan Sungai dan Danau berada; e. Surat keputusan penetapan trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat; f. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan; g. Surat permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;

2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	4 (empat) hari kerja
4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi KBLI 52222
6.	MASA BERLAKU	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang fasilitasi/Customer Service 2. Kota Saran : 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 4. Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Website : www.lapor.go.id www.dpmpstpktamedan.go.id/pengaduanapp/ 6. Media Sosial : DPMPSTPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan; 2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 6. PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayanan 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 8. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

		9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

2. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4. PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5. JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 19720904 199302 2 001

		<ol style="list-style-type: none"> 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 6. PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 8. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA	3 (tiga) bulan sekali

 Medan, 15 Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
4. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
8. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		4 Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 19720904 199302 2 001

		4 Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Perencanaan, Medial dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI
 (50111, 50131, 50141, 50114, 50134, 50133)

No Dokumen :
 Revisi :
 Tgl Efektif :

Unit Kerja : Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemerosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	<ol style="list-style-type: none"> Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan); Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia; Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA). Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> Grosse akta kapal; Surat ukur kapal yang masih berlaku Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan Crew list bagi tongkang bermesin Bukti setoran PNB Persyaratan Lainnya (digabung jadi satu bentuk pdf) : <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan Kajian Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan

2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
----	--------------------------------

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	3 (tiga) hari kerja
4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sesuai KBLI
6.	MASA BERLAKU	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service : Ruang Fasilitas/ Customer Service Kota Saran : Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com Website : www.lapor.go.id www.dpmpstpkotamedan.go.id/pengaduanapp/ Media Sosial : DPMPSTPMEDAN Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan; UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayanan

Unit Kerja : Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemrosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). 7. Persyaratan Lainnya (digabung jadi satu bentuk pdf) : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan b. Kajian Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
4	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
5	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi KBLI 50218, 50228
6	MASA BERLAKU	5 (lima) tahun setelah tanggal ditetapkan
7	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Customer Service : Ruang Fasilitas/Customer Service 2. Kota Saran : 3. Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 4. Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5. Website : www.lapor.go.id www.dpmpstpkotamedan.go.id/pengaduanapp/ 6. Media Sosial : DPMPTSPMEDAN 7. Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan; 2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 4. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 6. PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayanan 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 8. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan
2	SARANA PRASARANA	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan KBLI Angkutan Penyeberangan Dalam Kota Untuk Penumpang dan Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

 Medan, Februari 2023
 P.t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan
 NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN IZIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
TRANSPORTASI

(49442, 49450,)

No Dokumen :

Revisi :

Tgl Efektif :

Unit Kerja : Bidang Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait pemrosesan pelayanan (service delivery) telah tersistem pada Sistem OSS RBA meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
	PERSYARATAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA	<ol style="list-style-type: none"> Izin usaha kegiatan pokok; Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> pra trase jalur kereta api rencana kebutuhan lahan; hasil survey awal rencana jalur kereta api ; dan peta topografi Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus; keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian Persyaratan Lainnya (digabung jadi satu bentuk pdf) : <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan Kajian Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan

2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	14 (empat belas) hari kerja
4.	BIAYA /TARIF /RETRIBUSI	Tidak Ada Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Izin yang telah terverifikasi sesuai KBLI
6.	MASA BERLAKU	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
7.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Customer Service : Ruang fasilitasi/Customer Service Kota Saran : Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 32 Lantai II Medan 20143 Email : pengaduaninformasilayanan@gmail.com Website : www.lapor.go.id www.dpmpptspkotamedan.go.id/pengaduanapp/ Media Sosial : DPMPPTSPMEDAN Telp / Fax : (061) 7852253 (061) 7852254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> UU RI Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian; UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; PP RI Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

		<p>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>8. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;</p> <p>10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan</p>
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</p> <p>2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>4. Memahami tahapan kerja</p>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Koordinator</p> <p>4. Ketua Tim Kerja</p>
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk I

NIP. 19720904 199302 2 001

		<p>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>8. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>9. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;</p> <p>10. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan</p>
2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</p> <p>2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>4. Memahami tahapan kerja</p>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Koordinator</p> <p>4. Ketua Tim Kerja</p>
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat Standar dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI
 KBLI 52222, 52223, 50211, 50212, 50221, 50222, 50223, 50218, 50228, 50111, 50131, 50141, 50114, 50134, 50133

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis / Tim Teknis DPMPPTSP	Ketua Tim Kerja DPMPPTSP	Koordinator DPMPPTSP	Sekretaris DPMPPTSP	Kepala Dinas DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mengajukan Pemohonan Sertifikat Standar melalui OSS RBA	<pre> graph TD A([Pemohon]) -- Ya --> B{OPD Teknis / Tim Teknis DPMPPTSP} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C{Ketua Tim Kerja DPMPPTSP} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D{Koordinator DPMPPTSP} D -- Tidak --> C D -- Ya --> E{Sekretaris DPMPPTSP} E -- Tidak --> D E -- Ya --> F{Kepala Dinas DPMPPTSP} F -- Tidak --> E F -- Ya --> G([Kepala Dinas DPMPPTSP]) </pre>	Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	MULAI						
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi, verifikasi dilakukan atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar, jika permohonan lengkap dan benar. Jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi beserta lampiran teknis		
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi sub koordinator.							Berkas permohonan terverifikasi	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator		
4.	Melanjutkan kelanjutan penerbitan Sertifikat Standar							Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar		
5.	Memberikan Notifikasi Persetujuan Sertifikat Standar							Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar	1 hari	Sertifikat Standar Ditetapkan	SELESAI	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI
KBLI 49442, 49450**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis / Tim Teknis DPMP/TSP	Ketua Tim Kerja DPMP/TSP	Koordinator DPMP/TSP	Sekretaris DPMP/TSP	Kepala Dinas DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mengajukan Permohonan Izin melalui OSS RBA							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	MULAI	
2.	Berdasarkan izin yang belum terverifikasi, verifikasi dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan izin, jika permohonan lengkap dan benar. Jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan								Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi beserta lampiran teknis	
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi sub koordinator.								Berkas permohonan terverifikasi	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	
4.	Melanjutkan keayakan penerbitan izin								Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan izin	
5.	Memberikan Notifikasi Persetujuan Izin								Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan izin	1 hari	Izin Ditetapkan	SELESAI

2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruangan Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Izin dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, 15 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk I

NIP. 19720904 199302 2 001

2.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Jaringan Internet, Ruang Kerja, Ruang Fasilitas/Customer Service, Meja dan Kursi
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Memahami regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan sesuai KBLI 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami tahapan kerja
4.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Koordinator 4. Ketua Tim Kerja
5.	JUMLAH PELAKSANA	Analisis Perizinan Transportasi 2 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pengurusan perizinan yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Izin dari Sistem OSS dijamin keabsahannya
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	3 (tiga) bulan sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan

NURBANI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

BIDANG KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

NO. SOP : SOP / / DPM/PTSP/20
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Medan, Februari 2023

Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, s.Sos.M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19720904 198302 2 001

NAMA SOP

PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR & IZIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : D3/S1
2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami Dasar Hukum dan Persyaratan Perizinan Berusaha
4. Mampu Berkomunikasi Dengan Baik

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
2. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
3. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
7. PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
8. PP RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
9. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
11. PP RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;
12. PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
13. PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
14. PP RI Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
15. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
16. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. KM Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
18. KM Dirjend Perhubungan Darat Nomor 272/JK.105/DRJ/D/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
19. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan;
20. Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
21. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
22. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Sertifikat Standar dan Izin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Aplikasi Perizinan OSS RBA
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Sertifikat Standar dan Izin tidak akan berjalan dengan baik

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

BIDANG KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

NO. SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF

SOP/061/DPMPTSP/20

DISAHKAN OLEH

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

MURBAITI HARAHAP s.Sos.M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19720904 198302 2 001

PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR & IZIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

DASAR HUKUM

- UU RI Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
- UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- PP RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
- PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- PP RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;
- PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- PP RI Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- KM Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- KM Dirjend Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJ/D/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan;
- Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Perwali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelagasan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- Perwali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Strata Pendidikan : D3/S1
- Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
- Memahami Dasar Hukum dan Persyaratan Perizinan Berusaha
- Mampu Berkommunikasi Dengan Baik

- KETERKAITAN**
- SOP Penerimaan Sertifikat Standar dan Izin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

PERALATAN KELENGKAPAN

- Aplikasi Perizinan OSS RBA
- Printer
- Komputer
- ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Data OSS RBA

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Sertifikat Standar dan Izin tidak akan berjalan dengan baik

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

**BIDANG KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM**

NO. SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF

SOP/046/1/DPMP/TP/20

DISAHKAN OLEH

Medan, Februari 2023

Prit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, s.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

NAMA SOP

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) SEKTOR PEKERJAAN UMUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : D3/S1
2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami Dasar Hukum dan Persyaratan Perizinan Berusaha

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. UU RI Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Jalan ;
3. UU RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ;
4. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
5. UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
6. PP RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan ;
7. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
8. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 20/PM/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Permendan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan / Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Perwal Kota Medan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
13. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
14. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor PUJR

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Aplikasi Perizinan OSS RBA
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data OSS RBA

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) tidak akan berjalan dengan baik

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

**BIDANG KELOMPOK JF
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM**

NO. SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF

SOP/ **0461** / DPMPTSP/20

DISAHKAN OLEH

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

HARAHAP, s. Sos. M. AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

NAMA SOP

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) SEKTOR PEKERJAAN UMUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata Pendidikan : D3/S1
2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer
3. Memahami Dasar Hukum dan Persyaratan Perizinan Berusaha

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. UU RI Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Jalan ;
3. UU RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ;
4. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
5. UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
6. PP RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan ;
7. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
8. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: RI Nomor 20/PR/TM/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Permennan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dar / Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Perwal Kota Medan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;
13. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
14. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor PUPR

PERALATAN KELENGKAPAN

1. Aplikasi Perizinan OSS/RBA
2. Komputer
3. Printer
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data OSS RBA

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) tidak akan berjalan dengan baik